

Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu sebagai Daerah Otonom Baru *The Economic Growth of Batu City as a New Autonomous Region*

Lutfi Zaenurullah, Boedijono, Dina Suryawati
Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: zaenurullah@gmail.com

Abstract

Decentralization and local autonomy provide opportunities for the regions (province and regency/city) in Indonesia to undertake regional expansion. The implication is that the number of new autonomous regions (DOB) is higher and higher. However, the DOBs, viewed from the economic growth, tend to be under the parent regions. This means that the DOBs cannot respond to the demands of the expansion goals related to the acceleration of the regional economic development. Batu City was designated as a DOB through Law No. 11 Year 2001 on the establishment of Batu City. The economic growth of Batu City in 2002-2011 continuously increased and was higher than the average growth of Malang Regency which is the parent area of Batu City. This research was intended to determine the role of Batu City Government in improving its economic growth and analyze whether there was a sector shift in Gross Domestic Product (GDP) of Batu City. This type of research is descriptive with qualitative approach. In addition, to identify changes in leading sector of GDP in Batu City used Klassen's typology analysis.

Keywords: *decentralization and local autonomy, economic development, Klassen's Typology*

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Setelah mengetahui peran tersebut, peneliti menggunakan analisis tipologi kelas agar dapat melihat kemungkinan terjadinya perubahan posisi *leading sector* PDRB Kota Batu 2002-2011.

Peran pemerintah daerah terhadap perekonomiannya berkaitan dengan desentralisasi yang digunakan di Indonesia melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Seperti dikatakan Rondinelli (1983:4) yang dikutip Hidayat (2007:238),

“Dalam dimensi ekonomi, acapkali dikemukakan bahwa urgensi dari diterapkannya desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services* (barang dan jasa untuk umum), serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah”.

Pendapat Rondinelli didukung oleh Nurcholis (2005:181) yang menyatakan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membangun fasilitas publik untuk sarana menumbuhkan perekonomian daerah (*development for economic growth function*). Pembangunan tidak dapat terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini seperti disampaikan oleh Badruddin (2012: 113)

“Hakikat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah dan swasta dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi”.

Kota Batu ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Terbentuknya Kota Batu sebagai daerah otonom berkaitan dengan kebijakan tentang pemekaran daerah yang ditetapkan melalui PP No 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Sejak ditetapkannya PP di atas, pemekaran daerah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 1999 sampai tahun 2009 telah terjadi pemekaran daerah yang menghasilkan 205 Daerah Otonom Baru (DOB). Terdiri dari 7 Provinsi, 164 Kabupaten, dan 34 Kota (www.kemendagri.go.id).

Pemekaran daerah yang tidak terbandung di atas, dikomentari oleh Bank Dunia dalam Ratnawati (2009:15) yang menyimpulkan ada empat faktor utama pendorong pemekaran wilayah di masa reformasi yaitu (1) motif untuk efektivitas/ efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar, dan ketertinggalan pembangunan; (2) kecenderungan untuk homogenitas (etnis, bahasa, agama, urban rural, tingkat pendapatan, dan lain-lain); (3) adanya kemandirian fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang (disediakan dana alokasi umum/DAU, bagi hasil sumber daya alam, dan disediakan sumber-sumber Pendapatan Asli

Daerah/PAD); dan (4) motif pemburu rente (*bureucratic and political rent-seeking* para elit.

Empat faktor di atas ternyata tidak dapat menjamin adanya perbaikan kondisi DOB. Hal ini seperti dalam berita yang dirilis Kompas.com

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menilai, pemekaran wilayah yang sudah dilakukan hingga kini belum memberikan hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan rakyat. Gamawan bahkan mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah 70 persen dari 205 daerah otonom baru (DOB) gagal”. (Diakses 16 September 2012).

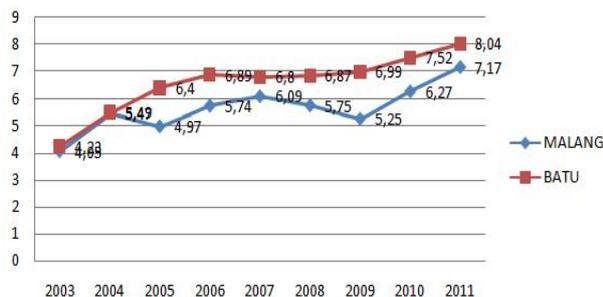
Salah satu kegagalan pemekaran daerah adalah tuntutan percepatan pembangunan ekonomi DOB yang tidak dapat dicapai. Hal ini seperti disampaikan oleh David Jackson et, al dalam Bappenas (2010:25) bahwa:

“Daerah Otonom Baru (DOB) sepanjang tahun 2000 hingga 2005 secara umum menunjukkan keadaan yang tidak lebih baik dibandingkan daerah induknya. Pada aspek ekonomi, pertumbuhan ekonominya masih relatif belum stabil disamping perannya masih lebih kecil dibandingkan wilayah lainnya. Kemiskinan juga relatif lebih tinggi meskipun terjadi trend penurunan. Apalagi tingkat kesejahteraan yang diukur dengan PDRB per Kapita juga masih ketinggalan dibandingkan daerah induk”.

Beberapa kasus pemekaran daerah tidak menunjukkan hasil yang memuaskan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Karena setelah dilakukan perbandingan, pertumbuhan ekonomi DOB cenderung berada di bawah daerah induk.

Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dan UNDP (2008:13) menyatakan bahwa “Tingkat pertumbuhan ekonomi di Daerah Otonom Baru (DOB) lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di daerah induk”. Tarigan (2010:25) menambahkan “kondisi DOB dibandingkan dengan Daerah Induk terkait pertumbuhan ekonominya masih relatif belum stabil”.

Pemilihan Kota Batu sebagai objek penelitian karena pertumbuhan ekonomi Kota Batu sejak ditetapkan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) terus mengalami peningkatan. Di bawah ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi antara Kota Batu dan Kabupaten Malang.



Gambar 1. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Batu dan Kabupaten Malang

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Batu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induknya yaitu Kabupaten Malang, dari tahun 2002-2011 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Batu terus dalam trend meningkat. sehingga di tahun 2011 mencapai angka 8,04%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Batu yang mencapai angka 6,58%, sedangkan Kabupaten Malang sebesar 5,64%. Di samping itu, laju pertumbuhan ekonominya juga stabil, yaitu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dari beberapa realitas yang penulis temukan di atas, mulai dari banyaknya kegagalan pemekaran di daerah lain, peningkatan jumlah DOB, sampai pada Pembentukan Kota Batu. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu sebagai Daerah Otonom Baru” agar dapat diketahui peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Tinjauan Pustaka

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32 Tahun 2004).

Sedangkan ciri-ciri desentralisasi menurut Smith (1985) seperti dikutip oleh Nurcholih (2005:11) adalah sebagai berikut.

1. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
2. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual fuctions*).
3. Penerima wewenang adalah daerah otonom
4. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan: wewenang mengatur dan mengurus (*regelling en bestur*) kepentingan yang bersifat lokal.
5. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak.
6. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit.
7. Keberadaan daerah otonom adalah di luar hirarki organisasi pemerintah pusat
8. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi.
9. Menciptakan *political variety* dan *diversity of structure* dalam sistem politik.

Pelaksanaan Desentralisasi memiliki manfaat yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Karena dengan wewenang yang dimiliki oleh daerah dapat

digunakan sebagai langkah untuk mengelola sumberdaya atau potensi yang ada.

“Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini dimana pemerintah daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian apabila sumberdaya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat” (Simanjuntak *et al*, 2012:89-90).

Pendapat di atas senada dengan yang dikatakan Rondinelli (1983:4) seperti yang dikutip Hidayat (2007:238), “Dalam dimensi ekonomi, acapkali dikemukakan bahwa urgensi dari diterapkannya desentralisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan *public good and services* (barang dan jasa untuk publik), serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan ekonomi di daerah”.

Otonomi daerah merupakan derivat dari desentralisasi. Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut azas desentralisasi dengan memberikan kewenangan kepada daerah menimbulkan adanya wewenang yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal ini seperti dalam UU 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom Baru

Dengan dianutnya desentralisasi dan otonomi daerah ini, berdampak terhadap adanya keinginan daerah untuk melakukan pemekaran daerah. Karena UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk melakukan pemekaran yaitu dalam BAB III Pasal 5 ayat 1-4.

1. Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial-budaya, sosial-politik, jumlah penduduk, luas Daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.
2. Pembentukan, nama, batas, dan ibukota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Undang-Undang.
3. Perubahan batas yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu Daerah, perubahan nama Daerah, serta perubahan nama dan pemindahan ibukota Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Syarat-syarat pembentukan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Terbentuknya DOB diawali dengan proses pemekaran daerah melalui kajian mendalam sehingga dapat memberi kesimpulan bahwa daerah tersebut layak dimekarkan dan dapat dibentuk DOB. Kelayakan daerah untuk dimekarkan ditetapkan melalui PP No 129

Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan pemekaran daerah adalah Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah (PP 129 Tahun 2000). Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi daerah adalah dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini seperti dikatakan Badruddin (2012: 113), memiliki pandangan lain tentang pertumbuhan ekonomi ia berpendapat bahwa

“Hakikat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan kebijakan pemerintah dan swasta dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi”.

Pernyataan di atas seperti dikatakan oleh Adisasmita (2011:26) bahwa “Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah atau negara”.

Seluruh nilai tambah merupakan *multiplier effect* dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi, yang akan berpengaruh terhadap pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran di atas menekankan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Adanya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh sinergi yang dilakukan oleh pemerintah dengan swasta dalam mengelola Sumberdaya.

Berdasarkan UU No 129 Tahun 2000 tujuan pembentukan DOB salah satunya adalah percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. DOB memiliki kewajiban untuk menjalankan isyarat ini. Lebih jauh lagi hal ini ditetapkan pula dalam UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yaitu menjalankan prinsip otonomi daerah yang salah satunya adalah pembangunan ekonomi di daerah.

“Tujuan pelaksanaan otonomi daerah, sesuai Undang-Undang No 22/1999 adalah merupakan upaya pemberdayaan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab dan pasti serta mewujudkan sistem perimbangan keuangan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah” (Sidik dalam Adisasmita, 2011:20)

Dengan adanya wewenang DOB untuk menjalankan pemerintahan daerah secara otonom. Maka, ada beberapa saran yang disampaikan oleh para pakar terkait hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Arsyad (2010: 387) menyatakan bahwa terdapat empat peran di bawah ini yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah.

1. *Entrepreneur*

Dengan perannya sebagai *entrepreneur*, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah Daerah dapat mengembangkan suatu usaha sendiri, misalnya melalui pembentukan BUMD. Asset-aset Pemerintah Daerah juga harus dapat dikelola dengan baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.

2. Koordinator

Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai coordinator dalam menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perluasan dari peranan ini dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya.

3. Fasilitator

Pemerintah Daerah dapat mempercepat pembangunan di daerahnya melalui adanya perbaikan lingkungan *attitudinal* di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan proses perencanaan serta pengaturan penetapan daerah (*zoning*) yang lebih baik.

4. Stimulator

Pemerintah Daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap berada di daerah tersebut.

Pendapat di atas, memiliki beberapa poin penting. Daerah wajib melakukan pembangunan atau penyediaan sarana-prasana untuk menjamin kemudahan pertumbuhan ekonomi. Dapat menarik investor baik domestik bahkan internasional serta menjamin kesehatan investasi dan keamanannya. Pajak yang diberlakukan juga harus disesuaikan dengan daerah di sekitar dan tidak melebihi ketentuan peraturan yang lebih tinggi, sehingga pengusaha tidak lagi khawatir dengan tingginya tingkat pajak.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan secara lebih mendalam berkaitan dengan peran pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Data-data yang digunakan adalah data Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Batu) untuk mengidentifikasi peran pemerintah yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunannya selama lima tahun, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Walikota Batu yang berguna mengetahui perencanaan yang dilakukan dengan pencapaiannya sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti, alasan pemilihan informan ini karena pengetahuan dan kapasitas mereka dalam judul penelitian ini. Adapun informan yang ditetapkan terdiri dari empat SKPD Kota Batu, yaitu Badan Perencanaan pembangunan Kota Batu, Dinas Pendapatan Kota Batu, Dinas Pariwisata Kota Batu, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu.

Analisis penelitian ini terdiri dari dua, yaitu analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang digunakan untuk mengetahui peran pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:247) terdiri dari *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verifitin* (penarikan kesimpulan / verifikasi)

Selain menggunakan analisis di atas, peneliti juga menganalisis perubahan yang terjadi dalam sektor PDRB dengan analisis tipologi klassen. Analisis tipologi klassen berguna untuk mengetahui prioritas pembangunan pembangunan perekonomian Kota Batu.

		Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB	
		$Y_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$	$Y_{SEKTOR} < Y_{PDRB}$
Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral	$r_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$	Sektor Unggulan	Sektor Berkembang
	$r_{SEKTOR} < Y_{PDRB}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Sumber: Mahmudi (2010: 53)

Gambar 2. Kategori Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen

Hasil dan Pembahasan

Kota Batu memiliki potensi pertanian, perdagangan dan pariwisata yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kunjungan wisatawan ke DTW dan minat wisatawan membeli makanan, minuman, dan lainnya. Sehingga peluang ini perlu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Di bawah ini merupakan peran pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

1. Pembangunan Sektor Pertanian

Pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Karena sektor ini merupakan input dari beberapa sektor lain seperti industri dan perdagangan. Sehingga perlu ada proses pembangunan

terhadap pertanian agar produktivitas para petani dan pemasarannya dapat dengan mudah dilakukan, menguntungkan, dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani.

Pemerintah daerah mencoba berbagai cara untuk memaksimalkan produktivitas pertanian, yaitu dengan mengembangkan pertanian organik sebagai upaya mengubah kebiasaan masyarakat petani yang cenderung melakukan pertanian secara anorganik. Sosialisasi tentang pertanian organik, pelatihan, dan bimbingan teknis dilakukan oleh pemerintah daerah melalui beberapa dinas pertanian. Harapannya, petani dapat dengan mudah melaksanakan pertanian organik dan dapat memproduksi sendiri pupuk organik.

Pertanian juga memiliki pasar sendiri baik di lingkungan Kota Batu maupun diluar Kota Batu. Pemasaran produk pertanian Kota Batu dapat dilakukan melalui program desa wisata, produk hasil pertanian Kota Batu langsung dipasarkan seperti dijadikan desa wisata petik apel, petik strawberry, dan petik jeruk. Selain melalui desa wisata, pemerintah Kota Batu juga mendorong UMKM agar dapat mengelola hasil pertanian Kota Batu menjadi makanan khas Kota Batu seperti kripik apel, jenang apel, dodol apel, sambal apel, kripik nangka, dll. Wujud konkrit yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan memberikan bantuan kepada beberapa UMKM berupa modal atau alat produksi bahan.

2. Pembangunan dan Pengembangan Objek Wisata

Kota Batu dengan *brand image* sebagai Kota Wisata Batu terus melakukan pembangunan dan pengembangan wisata khususnya desa wisata. Pembangunan dan pengembangan objek wisata ini selain dilakukan oleh beberapa stakeholder seperti pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata, Swasta dan Masyarakat Desa.

Dengan visinya “Kota Batu sebagai sentra pariwisata berbasis pertanian organik”. Maka secara otomatis akan memberikan peluang kepada masyarakat yang ada di desa untuk ikut berpartisipasi melakukan atau mengembangkan desanya untuk dijadikan sebagai desa wisata sesuai dengan keunikan, kekhususan, dan kelebihan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata akan memberikan bantuan kebutuhan desa wisata tersebut seperti di Dusun Kungkuk Desa Puntan yang membutuhkan sarana *outbond*, Gazebo, dan fasilitas lainnya dibantu oleh Dinas Pariwisata. Disamping itu, Dinas Pariwisata juga melakukan kegiatan untuk sarana promosi desa wisata seperti Batu Flora Festival (BFF) dan promosi melalui brosur-brosur yang berisi informasi tentang desa wisata.

3. Kemudahan Investasi Melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (KPPT)

Investasi memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti disampaikan oleh beberapa tokoh ekonomi aliran klasik dalam Badruddin (2012:127) yang menyatakan “*supply creates its own demand*”. Agar dapat memperoleh modal dari luar berupa investasi maka perlu dilakukan pemasaran daerah. Selain itu, SMI (Sri Mulyani Indrawati) dalam

Kuncoro (2009:129), “jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu adanya perbaikan iklim investasi dan infrastruktur yang memadai”.

Salah satu respon yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu adalah dengan mendirikan KPPT yang sekarang berubah nama menjadi BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu). Dengan adanya lembaga pelayanan perijinan ini, proses penanaman modal investor semakin mudah seperti disampaikan oleh beberapa informan memberikan jawaban sama berkaitan dengan investasi di Kota Batu. Investor diberi kemudahan untuk memperoleh beberapa layanan perijinan yang dibutuhkan. Sehingga sesuai dengan motto BPMPT Kota Batu pelayanan perizinan profesional, cepat, mudah transparan, dan pasti terhadap para investor yang akan bergabung di Kota Batu.

BPMPT di atas seperti dikatakan oleh Kuncoro (2009:240) merupakan langkah untuk memperbaiki iklim investasi dengan salah satu caranya adalah reformasi kelembagaan. “reformasi kelembagaan, terutama dalam pelayanan investasi. Dalam hal prosedur aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapa persetujuan, perizinan, dan “lampu hijau” dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau BKPM Daerah (BKPM D) untuk tahap awal”. Dengan adanya KPPT/BPMPT Kota Batu, maka dapat mempermudah investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Batu.

4. Pembangunan Prasarana Transportasi

Berkaitan dengan jalan, semua jalan untuk menuju tempat wisata telah diaspal. Hanya saja, permasalahan yang dihadapi Kota Batu khususnya di hari-hari liburan dan *weekend*, akses jalan menuju tempat wisata mengalami kemacetan. Jika persoalan kemacetan tersebut tidak segera diatasi. Maka, wisatawan akan berfikir dua kali untuk datang ke Kota Batu.

Persoalan kemacetan yang terjadi di hari-hari libur telah diupayakan oleh Pemerintah Kota Batu dengan membuka jalur-jalur alternatif, pembangunan Jalur Lingkar Barat, dan rencana pembangunan jalur Lawang-Batu

Dengan pembangunan jalan di atas, persoalan kemacetan yang terjadi di Kota Batu dapat diatasi. Dan roda perekonomian berjalan sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhannya.

5. Mempersiapkan SDM yang Sesuai dengan Kebutuhan Kota Wisata Batu

Sumberdaya manusia memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan yang ada didaerah dengan ekspektasi pertumbuhan ekonomi positif akan sulit terealisasi. Arsyad (2010:270) memberikan pendapatnya terkait pentingnya SDM yang berkualitas yang ia sebut sebagai *human capital investment*.

Antisipasi terhadap kasus ini, Kota Batu sebagai Kota wisata perlu ditunjang oleh SDM yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata. Sehingga Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan menjangking siswa-siswinya untuk diberikan beasiswa belajar di

Perguruan Tinggi dengan mengambil program studi atau jurusan pariwisata. Dengan harapan, ilmu yang diperoleh oleh pelajar atau mahasiswa Kota Batu dapat bermanfaat untuk pembangunan dan pengembangan Kota Wisata Batu itu sendiri.

Salah satu wujud berhasilnya peran pemerintah terhadap perekonomian dapat dilihat dari perubahan atau peningkatan kondisi sektor dalam PDRB. Kucoro (2010:9) “pembangunan ekonomi lebih dari sekedar

pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi diikuti dengan perubahan (*growth plus change*)”. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan tipologi klassen.

Analisis klassen dalam PDRB Kota Batu dibagi menjadi dua bagian. Pertama dari tahun 2002-2006 dan tahun 2007-2011, hal ini agar dapat diketahui ada dan tidaknya perubahan *leading sector* dalam PDRB tersebut.

		Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB	
		$Y_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$	$Y_{SEKTOR} < Y_{PDRB}$
Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral	$r_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$	Jasa	1) Listrik dan air bersih 2) Bangunan 3) Pengangkutan dan komunikasi 4) Keuangan dan jasa perusahaan
	$r_{SEKTOR} < Y_{PDRB}$	1) Perdagangan, hotel, dan restoran 2) Pertanian	1) Pertambangan dan penggalian 2) Industri pengolahan

Sumber: PDRB Kota Batu 2002-2006 (diolah)

Gambar 3. Tipologi Klassen PDRB Kota Batu tahun 2002-2006

Sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian berdasarkan gambar di atas tergolong dalam sektor terbelakang, karena kontribusinya terhadap PDRB berada di bawah rata-rata PDRB. Begitu juga dengan pertumbuhannya, paling rendah dibandingkan beberapa sektor lain dalam PDRB.

Sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan dan jasa perusahaan merupakan sektor berkembang, dimana kontribusinya berada di bawah rata-rata PDRB. Sedangkan pertumbuhan sektor listrik dan air bersih pertumbuhannya berada di atas rata-rata pertumbuhan PDRB.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar dalam

PDRB berada di atas rata-rata PDRB. Hanya saja, rata-rata pertumbuhan sektor ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan PDRB. Sehingga sektor ini menjadi sektor potensial dalam PDRB Kota Batu.

Sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor berkembang. Kontribusi terhadap PDRB berada di bawah rata-rata PDRB, sedangkan pertumbuhan sektor ini berada di atas rata-rata pertumbuhan PDRB. Sektor Jasa merupakan satu-satunya sektor unggulan dalam PDRB Kota Batu, kontribusi sektor jasa berada di atas rata-rata PDRB Kota Batu. Begitu juga dengan rata-rata pertumbuhan sektor ini berada di atas rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Batu.

		Rata-rata Kontribusi Sektoral terhadap PDRB	
		$Y_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$	$Y_{SEKTOR} < Y_{PDRB}$
Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral	$r_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$	1) Jasa 2) Perdagangan, hotel dan restoran	1) Listrik dan air bersih 2) Bangunan 3) Pengangkutan dan komunikasi 4) Keuangan dan jasa perusahaan
	$r_{SEKTOR} < Y_{PDRB}$	Pertanian	1) Industri pengolahan 2) Pertambangan dan penggalian

Sumber: PDRB Kota Batu 2007-2011 (diolah)

Gambar 4. Tipologi klassen PDRB Kota Batu tahun 2007-2011

Gambar 4 memperlihatkan bahwa, tidak banyak perubahan sektor dalam PDRB Kota Batu tahun 2007-2011 dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Sektor terbelakang masih terdiri dari industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian, sektor berkembang terdiri dari sektor listrik dan air bersih, sektor bangunan, sektor, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan dan jasa perusahaan.

Perubahannya adalah sektor potensial hanya terdiri dari satu sektor yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian tidak memiliki perubahan yang signifikan seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang menjadi sektor unggulan di tahun 2007-2011. salah satu penyebabnya adalah karena dari tahun 2007-2011 sektor pertanian pertumbuhannya terus mengalami terus mengalami penurunan sedangkan sektor perdagangan, hotel dan

restoran mengalami peningkatan. Hal ini yang menyebabkan sektor pertanian masih tetap menjadi sektor yang tergolong potensial. Sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terus mengalami pertumbuhan dan menjadi sektor unggulan karena sebagai Kota Wisata dengan kemudahan investasi, banyaknya tujuan wisata akan memiliki dampak langsung terhadap banyaknya wisatawan menginap di hotel, menikmati kuliner, dan belanja di Kota Batu.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Kota Batu telah menunjukkan keberhasilannya untuk memenuhi tujuan pemekaran daerah yaitu percepatan pembangunan ekonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya sejak tahun 2002-2011, selain itu terjadi perubahan *leading sector* yang awalnya hanya sektor jasa sebagai sektor unggulan dalam PDRB Kota Batu di tahun 2002-2006. Dan di tahun 2007-2011 sektor unggulan dalam PDRB Kota Batu menjadi dua yaitu sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

Pemerintah Kota Batu melakukan pembangunan dan pengembangan wisata yang memiliki efek domina terhadap pembangunan sektor pertanian dan sektor industri dan perdagangan sebagai pendukung pariwisata, Pembangunan Jalan, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai lembaga pelayanan investasi. Dengan adanya pembangunan di atas akan menimbulkan minat investor untuk melakukan investasi di Kota Batu. Investasi tersebut masuk ke perdagangannya seperti UMKM, pendorong wisata seperti hotel dan tempat wisata (MICE), pertanian, dan usaha lain. Masuknya investasi tersebut memiliki multiplier effect seperti meningkatkan lapangan kerja dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Batu.

Saran

Pemerintah Kota Batu bersama *stakeholder* terkait harus terus menjaga trend positif pertumbuhan ekonominya, dengan cara mempertahankan sektor unggulan dan membangunkan sektor terbelakang, berkembang, dan potensial. Agar dapat memacu kontribusi dan pertumbuhan sektornya terhadap PDRB. Meningkatkan iklim investasi yang telah berjalan di Kota Batu agar dapat menciptakan multiplier effect khususnya dalam membuka lapangan kerja dan peluang usaha demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan lebih dalam terkait sektor pertanian yang lima tahun akhir mengalami kecenderungan penurunan dan sektor perdagangan hotel dan restoran yang terus mengalami peningkatan. Jangan sampai meningkatnya investor menjadi penyebab semakin sedikitnya lahan untuk pertanian di Kota Batu.

Pemerintah daerah baik itu Provinsi, Kabupaten atau Kota harus benar-benar memperhatikan calon DOB agar sesuai dengan tujuan pemekaran daerah. Artinya

DOB harus memiliki keunggulan yang dapat dijadikan sebagai sumber atau potensi ekonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Lima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Bappenas dan UNDP. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance).
- Hidayat, Syarif. 2007. *Too Much Too Soon. Local State Elite's perspective on and the puzzle of contemporary Indonesian regional autonomy policy*. Edisi dua bahasa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Simanjuntak, Damanik, Siregar, Nilasari, Khairuddin, Mufti, Siswoyo, Ningsih, dan Lubis. 2012. *Otonomi Daerah, Etninasionanisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Tarigan, Antonius. 2010. Dampak pemekaran wilayah. *Majalah perencanaan pembangunan*. Edisi 01 Tahun XVI.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Internet

- Airil, Sabrina. 2012. *Mendagri: 70 Persen Pemekaran Daerah Gagal*. <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/15/06072741/Mendagri.70.Persen.Pemekaran.Daerah.Gagal>
- Rekapitulasi Jumlah daerah otonom baru pemekaran dari tahun 1999-2009. www.kemendagri.go.id